|  |  |
| --- | --- |
|  | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/e/e7/Uesaunggul.jpg |
|  | **MODUL PERKULIAHAN** |
|  |  |
|  | **OPINI PUBLIK** |
|  |  |
|  | **Voting Dalam Opini Publik** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Fakultas** | **Program Studi** | **Modul Sesi** | **Kode MK** | **Disusun Oleh** |  |
|  | Ilmu Komunikasi | Hubungan Masyarakat | **12** | **HMJ201** | Youna Chatrine Bachtiar, M.Ikom |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Abstract** | **Kompetensi** |
|  |  |
| Pokok bahasan tentang kegiatan voting dalam opini publik | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kegiatan voting dalam opini publik |

# Pembahasan

**Pengertian Voting**

Voting telah menjadi salah satu metode untuk mengambil keputusan penting dalam kehidupan manusia. voting digunakan mulai dari tingkat masyarakat terkecil, yaitu keluarga, sampai dengan sebuah negara. Voting digunakan untuk menghimpun aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, dan kemudian menemukan jalan keluar yang dianggap paling baik untuk menyelesaikan permasalahan.

Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, voting digunakan untuk mengambil keputusan negara yang sangat krusial, antara lain adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat, atau untuk memilih pemimpin negara yang baru. Akan tetapi, tidak seluruh warga negara dapat memberikan suara mereka dalam voting. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga negara tersebut untuk mendapatkan haknya, dan negara wajib untuk melindungi warga negara tersebut dalam memberikan suaranya. Oleh karena itu, voting membutuhkan prosedur pelaksanaan yang dapat menjamin kerahasiaan dan keabsahan dari hasil pelaksanaan voting tersebut.

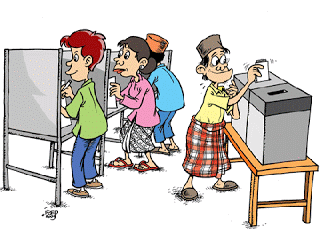
Voting / pemungutan suara bagian dari Demokrasi, bahwa setiap orang / anggota berhak untuk menentukan pilihannya. Pemungutan suara dilakukan dengan dua macam cara, Pemungutan suara secara terbuka dan tertutup.

Berbagai sistem dan perundang-undangan pemilihan diperlukan dalam pelaksanaan pemilihan itu. Keduanya mencakup hal-hal sebagai berikut:

* Frekuensi: jadwal yang pasti untuk pemilihan sebagaimana terjadi di AS atau pemilihan yang harus diselenggarakan dalam periode waktu yang tetap (terjadi di Inggris)
* Tujuan: untuk memilih anggota badan legislatif lokal, regional dan nasional dan kepala negara; pemilihan-pemilihan juga dapat diselenggarakan untuk menetapkan masalah-masalah kebijakan, melalui referendum, atau pencalonan melalui pemilihan pendahuluan.
* Eligibilitas: pada dasarnya semua negara membatasi hak suara hanya pada warga negara dewasa, kendati negara-negara tersebut berbeda dalam menetapkan kriteria tentang kedewasaan dan kewarganegaraan.
* Registrasi: para pemberi suara harus diregistrasikan pada daftar atau register pemilih; registrasi di AS lebih rumit daripada di negara-negara lain.
* Bobot suara: sampai sebatas mana sistem menghitung satu orang, satu suara, satu nilai itu bergantung pada tipe sistem pemilihan dan ukuran konstituensi.

Kajian tentang perilaku pengambilan suara mendalami beberapa tahap dan menggunakan berbagai pendekatan. Berikut ini beberapa model, berasal dari berbagai latar belakang intelektual, yang meliputi pendekatan historis, data agregat, sosiologi, identifikasi partai, dan isu pemungutan suara.

1. Pendekatan historis memandang bahwa seringkali dilupakan kenyataan para pemberi suara disodorkan pada pemilihan dengan suatu pilihan partai yang tetap: ini semua adalah produk kekuatan historis yang telah lama ada sebelum lahirnya para pemilih masa kini. Karya penting dari Lipset dan Rokkan (1967) menelusuri asal-usul berbagai sistem banyak partai hingga ke peristiwa-peristiwa bersejarah yang paling penting seperti Reformasi dan Kontra-Reformasi, revolusi industri, fase-fase awal pembentukan suatu negara dan revolusi Perancis. Peristiwa-peristiwa formatif ini menimbulkan berbagai sistem kepartaian yang berbeda satu sama lain berdasarkan keterikatan pada agama, kepentingan kelas, dan loyalitas kepada pusat versus pinggiran (periferi). Setelah terjadinya berbagai peristiwa ini, sebagian partai mampu terus bertahan dalam berbagai keadaan yang menumbuhkannya. Mereka beradaptasi dengan berbagai kepentingan dan isu baru dan mensosialisasi para pemberi suara agar memberikan suara mereka kepada partai-partai itu.
2. Pendekatan data agregat (yang terkumpul) menganalisis data sensus untuk unit tertentu (entah itu berupa wilayah, anggota-anggota perwakilan atau daerah pemilihan) untuk membangun korelasi-korelasi antara berbagai faktor sosial yang dominan di kalangan penduduk dan kekuatan suatu partai. Pendekatan ini mengalami kemapanan di Amerika Serikat dan Perancis dalam dasawarsa-dasawarsa awal abad ke-20 dan Andre Siegfried mempergunakannya untuk menjelaskan pembagian geografis Perancis menjadi wilayah-wilayah bergaris politik kiri dan kanan. Pendekatan ini akan lebih bermanfaat bila unit yang dikaji memiliki ciri sosial yang mencolok (misalnya komunitas pertambangan atau pertanian). Masalahnya adalah bagaimana memindahkan korelasi data agregat ke korelasi data individual.
3. Pendekatan sosiologi, yang menggunakan survei-survei sampel untuk mewawancarai para pemberi suara, dirintis di Amerika Serikat pada tahun 1940-an (Lazarsfeld et. al. 1948) dan memungkinkan dilakukannya kajian-kajian terhadap para pemberi suara individu. Karya ini menunjukkan bahwa faktor-faktor latar belakang sosial seperti kelas, agama dan tempat tinggal mendorong banyak orang untuk memilih partai Republik atau Demokrat. Pendekatan ini juga berguna untuk menunjukkan sampai batas mana partai-partai itu mampu membentuk kelompok-kelompok pendukung yang terpadu. Di Inggris kajian perintis yang dilakukan oleh Butler dan Stokes (1969) menunjukkan arti pentingnya kelas sosial dan agama dalam membentuk basis dukungan partai.
4. Pendekatan identifikasi partai, yang dipinjam dari disiplin psikologi, dikembangkan oleh Angus Campbell (1960) dan kolega-koleganya di Universitas Michigan. Mereka menemukan bahwa sebagian besar pemberi suara di Amerika Serikat terikat dengan suatu partai politik; mereka memiliki identitas partai, yang sering diwarisi dari orang tua mereka, dan diperkuat dengan pekerjaan, kelas dan lingkungan tetangga mereka. Kenyataan itu menjadi penguat untuk melestarikan perilaku pemberi suara. Pendekatan identifikasi partai pernah memiliki pengaruh besar terhadap kajian-kajian mengenai pemilihan, penelitian antar bangsa dan tipologi pemilihan yang sedang berkembang. Di Amerika Serikat pada tahun 1970-an dan 1980-an identifikasi mengalami kemunduran dalam meramalkan perolehan suara partai. Meskipun para tokoh partai Demokrat memperoleh pedoman yang jelas mengenai identifikasi terhadap para tokoh partai Republik mendapatkan gambaran yang jelas tentang identifikasi para Republik, tapi tetap saja mereka selalu mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden. Konsep ini juga berguna membantu membangun [perolehan] suara bagi suatu partai.
5. Pendekatan voting isu, diilhami oleh Downs (1957) dan diterapkan oleh Himmelweit dan Jaeger (1985). Pendekatan ini menekankan arti penting preferensi-preferensi isu bagi pemberi suara. Menurut Himmelweit, yang menyebutnya dengan istilah consumer model voting, preferensi-preferensi isu yang dibangkitkan oleh kekuatan identifikasi partai dan kebiasaan memberikan suara kepada satu partai tertentu merupakan penentu keputusan dalam memberikan suara. Para peneliti menspesifikasi tiga syarat bagi isu voting: pemberi suara harus menyadari isu itu, peduli terhadap isu itu, dan mempersepsi partai-partai sebagai sisi pandang yang berbeda terhadap isu itu, dengan satu partai yang mewakili preferensi isu tersebut. Jika identifikasi partai mengarah pada voting ekspresif, maka pilihan rasional mengarah pada voting instrumental. Kajian-kajian awal mengenai voting menunjukkan sikap apatis dan tidak mau tahu dari banyak pemberi suara dan membuktikan bahwa hanya ada sekelompok pemberi suara minoritas saja yang memenuhi syarat-syarat isu voting itu. Namun penelitian lebih mutakhir, yang membolehkan para pemberi suara menyatakan isu-isu penting mereka sendiri, menemukan bahwa isu voting itu memiliki jangkauan yang lebih luas.



**Voting**

Perkembangan voting lebih menekankan pada pedekatan behavioral karena pada prinsipnya berkaitan erat dengan perilaku pemilih dalam voting sendiri dikenal (Voting Behavior) artinya ada kebebasan tingkah laku sesorang dalam menentukan pilihannya. Berkaitan perspektif itu Bodiarjo (2001), kemudian memaknai bahwa *voting behavior* merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, terutama dalam memilih pemimpin negara baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Public Policy).

Voting pun tidak sepenuhnya mampu memberi jaminan atas penyelenggaraan

pemilihan dan keterwakilan yang lebih adil dan rasional secara kompetetif. Kenapa demikian karena, ekspektasi konstituen secara personal memiliki perbedaan baik dari segi sosiologi maupun aspek psikologi, karena teori-teori yang berusaha dikembangkan oleh Heywood (2014) tentang voting memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, misalnya teori-teori yang dikembangkan antara lain:

1. Model Identifikasi Partai

Hakikatnya mengindikasikan ikatan psikologi antara konstituen atau dengan kata lain masyarakat dengan partai, hal positif atas penerapan model ini adalah terciptanya *strong father* atau para partisipan yang memiliki loyalitas tinggi baik kepada partai maupun kepada figur yang dimandat oleh partai. Di Indonesia misalnya secara faktual sejumlah partai-partai besar dan bertahan ditengah persaingan partai lainnya serta mampu mempertahankan kekuasaan pemerintahan, sebut saja misalnya misalnya PDIP dengan figurnya Megawati Soekarno Putri, Partai Demokrat dengan sosok SBY dan Partai Golkar yang dengan mayoritas figurnya, bahkan tidak memiliki ancaman yang cukup berarti meskipun bermunculan partai-partai baru, namun popularitas partai dan figurnya tidak berkurang karena adanya komitmen kuat atas ikatan psikologi dari mayarakat dengan partai tersebut. Dengan demikian solid dan loyalnya partisipan maka akan sangat berimplikasi terhadap jaminan suara dalam sistem voting.

1. Model Sosiologis

Teori voting lebih kepada pendekatan sosial, jadi ini tentunya sangat berkolaborasi dengan nilai-nilai kebangsaan dan pluralitas masyarakat pada suatu sisi sistem demokrasi dengan mekanisme voting jelas berangkat dari sosialisasi, karena bagaimanapun popularitas elit dan partai tanpa melakukan sosial dan pendekatan sosial kepada masyarakat tentu akan sangat kesulitan menemukan irama dalam mengartikulasi arah kebijakan pemerintahan nantinya. Sehingga dengan tersedianya sarana sosialisasi maka secara ojektif mempermudah masyarakat untuk menentukan pilihannya pada saat penyelenggaraan voting. Problemnya kemudian adalah pendekatan ini berpotensi besar menimbulkan perpecahan antar tingkatan kelas masyarakat.

1. Model Pilihan Rasional

Model ini berasumsi bahwa voting tidak lebih hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan tertentu secara individualistik, walaupun dianggap bahwa voting sebagai umpan balik pada partai yang berkuasa sekaligus mengetahui bagaimana kinerja dan penerapan kebijakan dalam mempengaruhi pilihan masyarakat. Distorsi voting dengan model pilihan rasional adalah nilai sosial dan budaya seakan kabur bahkan memiliki keterbatasan untuk mengevaluasi isu-isu dan mengalkulasi kepentingan, karena terpusat pada loyalitas kelompok dan ikatan partai.

1. Model Idiologi Dominan

Pendekatan ini menyerupai model sosiologis, dimana voting dianggap merefleksikan posisi seseorang dalam hierarki sosial. Bila dibandingkan keselurahan model yang ada maka dapat di pastikan bahwa model ideologi dominan ini nampak lebih radikal karena orientasinya melalui jalur pendidikan dan media massa.

Sehingga pengaruhnya terhadap masyarakat akan sangat mendominasi ideologi mereka, bahkan tidak menutup kemungkinan muncul pro dan kontra terhadap mekanisme penerapan voting yang ada, disamping itu dengan konstruk ideologi melalui sosialisasi jalur pendidikan dan media massa jurstru juga menambah khsanah bagi pemerintah atau elit politik yang lahir dari mekanisme voting untuk mengakselerasi kebijakan atas otoritasnya, yang menjadi ke khawatiran adalah dengan kondisi sosial yang berlebihan maka akan berimbas pada otoritas dan otonomi personal.

**Opini dan Voting**

Apa yang membuat seseorang memilih (vote) kandidat sebagai presiden? Kebanyakan memiliki pendapat yang berbeda. Akan tetapi Sobel dan Shiraev (2006) menyebutkan bahwa kebanyakan pemilih memilih berdasarkan isu yang diangkat oleh kandidat, favoritism, atau justru kebencian terhadap kandidat lawan.

Dalam menentukan opini mereka tentang seorang kandidat, seorang individu memiliki proses yang kompleks dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam buku People and Their Opinions, Sobel dan Shiraev membagi dua hal yang mempengaruhi individu dalam melakukan voting yaitu Ideologi dan Partisan.

**Sistem Voting di Indonesia**

Voting adalah kegiatan yang memiliki resiko yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan banyak kepentingan yang tercakup didalamnya. Prosedur pelaksanaan voting telah diatur agar kerahasiaan dan keabsahan dari proses pemungutan suara tersebut dapat terjaga, sehingga tidak akan terjadi kontroversi mengenai hasil voting tersebut. Secara garis besar, voting dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan kegiatan, yaitu pendaftaran para pemilih, pemungutan suara dan penghitungan hasil. Dalam sistem voting standar, pada masing-masing tahapan masih menggunakan proses manual dengan menggunakan banyak tenaga manusia dalam melaksanakan tahapan-tahapan tersebut.

Dalam pelaksanaan voting, sering terjadi kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh *human error*, atau disebabkan karena sistem pendukung pelaksanaan voting yang tidak berjalan dengan baik. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan voting di Indonesia selama ini:

* Banyak terjadi kesalahan dalam proses pendaftaran pemilih. Kesalahan ini terjadi karena sistem kependudukan yang masih belum berjalan dengan baik. Konsep penggunaan banyak kartu identitas menyebabkan banyaknya pemilih yang memiliki kartu suara lebih dari satu buah. Keadaan ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meningkatkan jumlah suara pilihannya sehingga dapat memenangkan voting tersebut.
* Pemilih salah dalam memberi tanda pada kertas suara, karena ketentuan keabsahan penandaan yang kurang jelas, sehingga banyak kartu suara yang dinyatakan tidak sah. Pada tahapan verifikasi keabsahan dari kartu suara, sering terjadi kontroversi peraturan dan menyebabkan konflik di masyarakat.
* Proses pengumpulan kartu suara yang berjalan lambat, karena perbedaan kecepatan pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing daerah. Penyebab lainnya adalah kesulitan untuk memeriksa keabsahan dari sebuah kartu suara, sehingga pengumpulan tidak berjalan sesuai dengan rencana.
* Proses penghitungan suara yang dilakukan di setiap daerah berjalan lambat karena proses tersebut harus menunggu semua kartu suara terkumpul terlebih dahulu. Keterlambatan yang terjadi pada proses pengumpulan, akan berimbas kepada proses penghitungan suara. Lebih jauh lagi, proses tabulasi dan pengumuman hasil perhitungan akan meleset dari perkiraan sebelumnya.
* Keterlambatan dalam proses tabulasi hasil penghitungan suara dari daerah. Kendala utama dari proses tabulasi ini adalah kurangnya variasi metode pengumpulan hasil penghitungan suara. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya infrastruktur teknologi komunikasi di daerah. Oleh karena itu, seringkali pusat tabulasi harus menunggu data penghitungan yang dikirimkan dari daerah dalam jangka waktu yang lama. Akibat dari hal tersebut, maka pengumuman hasil voting akan memakan waktu yang lama.
* Permasalahan yang terpenting adalah kurang terjaminnya kerahasiaan dari pilihan yang dibuat oleh seseorang. Banyak pemilih mengalami tekanan dan ancaman dari pihak tertentu untuk memberikan suara mereka kepada pihak tertentu. Lebih buruk lagi, terjadi “jual-beli suara“ di kalangan masyarakat tertentu, sehingga hasil voting tidak mewakili kepentingan seluruh golongan masyarakat. Permasalahan-permasalahan diatas akan menimbulkan kontroversi terhadap keabsahan hasil voting dan memicu munculnya konflik antara golongan masyarakat yang memiliki perbedaan kepentingan. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ketidakpuasan terhadap hasil voting dapat mengakibatkan pertumpahan darah diantara golongan masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan voting diharapkan dapat mengurangi tingkat kesalahan yang muncul selama ini. Dengan demikian potensi terjadinya konflik dalam masyarakat dapat dihindari. Harapan ini yang menyebabkan besarnya desakan untuk menggunakan bantuan komputer dalam pelaksanaan voting.

**Electronic Voting (e-Voting)**

Dewasa ini banyak negara menggunakan inovasi teknologi informasi dalam urusan kenegaraan seperti e-voting, yang artinya adalah pemilihan itu sendiri dilakukan oleh negara melalui sistem yang berintegrasi. Menurut Rokhman dalam (Ridwan et al., 2016) mengatakan bahwa e-voting adalah suatu sistem pemilihan dimana data dicatat, disimpan dan diproses dalam bentuk digital sistem. Dengan kata lainnya e-voting merupakan pemungutan suara yang proses pelaksanaannya sendiri mulai dari pendaftaran pemilih sendiri, pelaksanaan pemilihan, perhitungan suara dilaksanakan secara elektronik.

Kajian berbagai model e-voting yang pernah diterapkan, termasuk mesin yang diproduksi oleh BPPT. Kesimpulan yang dihasilkan, bahwa e-voting bukan teknologi yang dibutuhkan untuk mengganti metode pungut hitung di pemilu Indonesia untuk saat ini. Berdasarkan kajian tersebut, KPU menilai ada tiga syarat yang sejatinya belum benar-benar terjawab melalui e-voting yaitu aspek kepercayaan keamanan, aspek transparansi, serta proses uji coba teknis yang terus menerus. Selain syarat tersebut, kunci lainnya adalah kepercayaan masyarakat. Penggunaan sistem tersebut akan mengubah paradigma masyarakat soal tata cara memilih pemimpin. Penggunaan e-voting masih menghadapi soal kepercayaan masyarakat. Metode ini akan mengubah paradigma masyarakat soal tata cara memilih pemimpin. Selain itu pengalaman negara lain juga menggaris bawahi bahwa persoalan yang di hadapi juga menyangkut kepercayaan.

Berdasarkan kajian Perludem, e-voting juga belum relevan untuk digunakan di Indonesia. e-voting yang dilakukan di negara lain berkenaan dengan temuan kecurangan dalam proses pemungutan suara. Sedangkan di Indonesia terletak pada proses rekapitulasi perolehan suara. Berdasarkan kajian tersebut teknologi yang dibutuhkan Indonesia untuk mengatasi masalah pada rekap suara. Seharusnya solusi teknologi bisa mengantisipasi masalah pada rekap suara. Sedangkan proses pungut hitung seharusnya dipertahankan, dengan catatan pendidikan bagi pemilih harus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

KPU telah menerapkan teknologi e-recapitulation (e-recap) yang disebut SITUNG (Sistem Informasi Pungut Hitung) itu pada pemilu 2014, Pilkada 2015, Pilkada 2017. Meski tidak punya sifat mengkoreksi atau menyatakan hasil perolehan suara, sistem ini diklaim tingkat kesuksesannya tinggi dan minim celah gugatan.

(Wallach, 2008) menyebutkan bahwa memang di beberapa Negara penggunaan e-voting sudah berjalan dengan baik, tetapi di Indonesia sendiri masih belum di terapkan karena Perludem mendesak Pemerintah serta DPR RI untuk tidak menjadikan e-voting sebagai satu-satunya solusi teknologi untuk pungut hitung Indonesia. Pemerintah dan DPR sebaiknya ikut mempelajari dan mempertimbangkan teknologi e-recap yang sedang disiapkan oleh KPU RI. Minimnya pilihan teknologi serta ketergesaan dalam mengambil keputusan dapat meruntuhkan pencapaian baik yang telah diraih oleh Indonesia di bidang kepemiluan. Dalam hal ini kami melihat ada tiga faktor yang menyebabkan belum siapnya pemerintah kita dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk melaksanakan sistem e-voting di Indonesia. Walaupun kajian-kajian tentang penerapan sistem e-voting ini sudah lama dilakukan sejak dari KPU periode 2004, bahkan DPR telah beberapakali melaksanakan study banding di beberapa negara yang sudah melaksanakan sistem e-voting.

Dari seluruh seluruh kajian yang pernah dilakukan baik oleh pemerintah maupun LSM kami melihat ada tiga faktor utama yang harus disiapkan pemerintah terlebih dahulu untuk dapat melaksanakan sistem e-voting. Karena faktor ini kami anggap menentukan dapat terlaksananya sistem e-voting tersebut di Indonesia.

1. Analisis Kelayakan Sumber Daya Manusia

Di Indonesia, penerapan e-Voting sendiri menimbulkan beberapa kekhawatiran mengenai kendala apa saja yang bakal dihadapi jika benar-benar menggunakan sistem e-Voting ini. Salah satunya yakni kesiapan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Indonesia untuk menggunakan sistem ini. Kenyataan bahwa SDM Indonesia yang masih timpang terutama kelompok usia tua di pedesaan yang ketinggalan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga diperlukan penelitian lebih dalam mengenai kesiapan SDM Indonesia dalam penggunaan sistem e-Voting. Sistem e-Voting dapat diterapkan dengan asumsi bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan dasar tentang penggunaan komputer dan internet serta e-KTP sebagai alat validasi yang akurat karena nomor KTP mempunyai nilai yang unik atau berbeda satu dengan yang lain.

1. Analisis Kelayakan Ekonomi

Besarnya anggaran yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pilkada terkadang tidak diimbangi dengan hasil pilkada yang berkualitas. Sebelum pilkada, penyelenggara disibukkan dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih menggunakan sistem manual. Yang terjadi kekacauan berkaitan dengan DPT di berbagai daerah terus terjadi. Banyak masyarakat yang kehilangan hak suaranya karena tidak terdaftar dalam DPT. Belum lagi berbagai masalah yang timbul lainnya terkait dengan penyelenggaraan pemilu mulai dari surat suara dan kotak suara yang rusak. Hingga puncaknya ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pilkada, yang mengakibatkan kerusuhan dan pengrusakan terhadap infrastruktur milik pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian pasca pilkada. Hal ini akan menambah besar anggaran biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi konflik pasca pilkada.

Berkaitan dengan e-Voting, dalam penerapannya dilihat dari sisi ekonomi pemerintah selaku penyelenggara yang akan membuat sistem tersebut pengeluaran anggaran untuk membangun pertama sekali sistem e-voting pasti cukup besar karena harus membangun jaringan dan sistem diseluruh wilayah Indonesia kemudian juga perlu dilakukan sosialisasi yang masif untuk penerapan sistem ini. Selain itu biaya untuk perawatan sistem ini juga perlu untuk diperhitungkan kerena setiap tahun pasti harus di *upgrade*.

1. Analisis kepercayaan masyarakat

Masih banyaknya msayarakat Indonesia yang belum familiar dengan teknologi informasi menjadi salah satu kendala tersendiri, dan pengetahuan masyarakat mengenai sistem teknologi tersebut juga masih rendah. Kemudian masih munculnya paradigama ketidak percayaan masyarakat terhadap hasil perhitungan suara karena hasil kecurigaan data dimanipulasi oleh pihak tertentu dapat menyebabkan kekacauan dan konflik dalam masayarakat. Sehingga penerapan sistem e-voting ini sangat kurang kepercayaan masyarakat karena mereka melihat sistem ini masih merupakan hal baru jadi kecurigaan dan kewaspadaan masyarakat sangat tinggi terutama masalah kecurangan, tapi hal ini terjadi biasanya pada masyarakat tingkat bawah atau masyarakat awam.

**Ideologi dan Opini**

Opini publik merupakan pendapat kelompok masyarakat atau sintesa dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Agregat dari sikap dan kepercayaan ini biasanya dianut oleh populasi orang dewasa. Opini publik memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah sosialisasi politik, budaya politik, ideologi negara dan agama, struktur ekonomi dan strata sosial, serta struktur negara.

Sosialisasi politik adalah proses pewarisan nilai-nilai dari generasi sebelumnya ke generasi setelahnya yang merujuk pada pembentukan sikap dan tingkah laku politik. Peristiwa ini tidak menjamin bahwa masyarakat mengesahkan sistem politiknya, sekalipun hal ini mungkin bisa terjadi. Dalam kaitannya dengan opini publik, sosialisasi politik yang dilakukan mempengaruhi opini publik yang berkembang. Jika sosialisasi yang terjadi adalah mengenai A, maka publik akan mengemukakan opini-opini yang mengarah pada A. Sosialisasi politik pun mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang bertentangan dari opini orang kebanyakan. Sosialisasi politik mengarahkan pikiran publik untuk menyatakan opini-opini mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang disosialisasikan itu.

Budaya politik merupakan orientasi psikologis terhadap obyek sosial yang meliputi aspek kognitif, afektif dan evaluatif yang ditujukan kepada sistem politik secara umum. Atau, secara praktis, budaya politik merupakan seperangkat nilai-nilai yang menjadi dasar para aktor untuk menjalankan tindakan-tindakan dalam ranah politik. Budaya politik membentuk orientasi/arah opini seseorang yang pada akhirnya menentukan opini publik. Suatu komunitas yang mempunyai budaya politik yang relatif sama akan membentuk opini yang sama pula.

Ideologi menggerakkan orientasi seorang individu untuk beraktivitas. Ideologi negara menggerakkan suatu negara untuk bertindak. Ideologi negara akan mengarahkan opini publik ke arah yang diinginkan negara tersebut. Indonesia tidak akan membiarkan opini publik mengenai komunisme berkembang dan menjalar karena hal itu bertentangan dengan ideologi Pancasila yang dianut. Sedangkan ideologi agama berpengaruh lebih luas. Ideologi agama dapat menyebabkan fragmentasi opini-opini publik ke dalam kotak-kotak dalam agama tersebut. Pendapat Muhammadiyah seringkali berbeda dengan pendapat kaum Nahdlatul Ulama meskipun mereka sama-sama satu agama.

**Ideologi Politik**

**Pengertian ideologi politik** sendiri menurut Miriam Budiardjo (2008) dapat dipahami sebagai “himpunan nilai, ide atau norma, kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar bagaimana ia menentukan sikap terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapi serta yang menentukan perilaku politiknya”.

Pengertian ideologi lainnya dapat dipahami sebagai kumpulan gagasan yang secara logis berkaitan dan mengidentifikasikan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang memberi keabsahan bagi institusi politik dan prilakunya (Carlton C. Rodee).

Dalam pengertian lain (Macridis 1983, h. 4), menyatakan bahwa di dalam ideologi politik, terdapat nilai-nilai dan ide-ide yang membingkai cara berpikir serta perilaku politik seseorang yang digunakan untuk menggerakkan kegiatan dan aksinya. Jadi, bisa dikatakan bahwa sumber ideologi politik berasal dari filsafat politik dan teori politik.

Sederhananya, ideologi politik inilah yang biasanya mempengaruhi pola pemikiran masyarakat terhadap kancah perpolitikan dan bagaimana mereka mengambil suatu tindakan politik. Berbeda ideologi politik yang dianut, berbeda pula cara berpikir dan bertindaknya.

Ideologi politik yang berkembang di masyarakat bisa berbagai macam. Ada kalanya, ideologi politik yang terbentuk memiliki bentuk yang sangat sederhana. Namun, ada kalanya pula ideologi ini terdistorsi dari sumber-sumbernya sehingga terdapat kerancuan dalam implementasinya.

Masyarakat yang telah percaya terhadap nilai-nilai atau ide-ide politik tertentu biasanya akan cenderung memaksakan teori politik atau pun filsafat politik yang dipercayainya untuk dapat diterapkan dalam masyarakat tersebut.

Namun, hal yang cukup sulit diketahui adalah kapan dan dalam lingkungan yang sepeti apa sebuah teori politik atau pun filsafat politik dapat bertransformasi menjadi sebuah ideologi politik. Padahal, untuk bisa menjadi ideologi politik, teori maupun filsafat ini harus menjadi dasar yang kuat bagi gerakan yang berorientasi pada tindakan (*action-oriented movement*).

**Fungsi Ideologi Politik**

Fungsi ideologi politik dalam masyarakat sendiri ada berbagai macam. Menurut Macridis (1983, h. 9-13), ideologi politik secara umum berfungsi sebagai seperangkat ide dan kepercayaan yang dianut sejumlah orang atau kelompok masyarakat, yang menentukan apa yang bernilai apa yang tidak, apa yang dijaga keberlangsungannya apa yang harus dirubah, serta tentu saja untuk membentuk pemikiran, perilaku serta tindakan-tindakan politik dari kelompok masyarakat yang menganut ideologi politik tersebut.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, ideologi politik inilah yang memprovokasi serta memberi kerangka kerja mendasar bagi tindakan-tindakan politik dalam masyarakat. Jika diuraikan secara khusus, berikut adalah fungsi-fungsi ideologi politik:

1. Memberikan dasar legitimasi bagi pemerintah,
2. Sebagai sarana memobilisasi dan membentuk solidaritas, serta mempersatukan rakyat,
3. Memperlihatkan seberapa pentingnya pimpinan untuk memanipulasi pesan-pesan yang ingin disampaikan,
4. Sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berekspresi, yang mencerminkan hubungan pemimpin dan massa
5. Sebagai landasan atau pedoman untuk menentukan tindakan politik dan kebijakannya.
6. Menjadi dasar untuk menentang kekuasaan status quo.

## **Pembagian Ideologi Politik**

Ideologi politik dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, yang pembagiannya bisa didasarkan pada:

### **Ideologi yang mempertahankan**status quo

### Bentuk ideologi ini adalah bentuk ideologi yang mempertahankan dan merasionalisasikan keteraturan-keteraturan dalam hal ekonomi, sosial, dan politik dalam waktu tertentu dan dalam masyarakat apa pun.

### Contoh ideologi ini: Liberalisme, Komunisme di ex-Uni Soviet.

1. Ideologi radikal atau ideologi revolusioner

Ideologi ini mengadvokasi perubahan-perubahan secara menyeluruh dan intensif serta bersifat revolusioner.

Contoh ideologi ini: Marxisme, Fasisme.

1. Ideologi reformis

Ideologi reformis adalah bentuk ideologi yang mengadvokasi perubahan-perubahan yang dilakukan secara bertahap.

Contoh ideologi ini: Developmentalisme.

**Komponen – Komponen Ideologi**

Suatu teori dan filsafat politik dalam menjelma jadi ideologi politik, ketika di dalamnya terdapat komponen-komponen tertentu. Adapun komponen dalam ideologi adalah:

* Nilai – nilai.
* Visi tentang masyarakat politik yang ideal.
* Konsepsi tentang sifat dasar manusia.
* Strategi perjuangan.
* Taktik politik.

Komponen inilah yang menjadi pembeda antara pemikiran dan ideologi. Sebab, tidak setiap pemikiran politik, dapat dikategorikan sebagai ideologi politik. Untuk lebih memahami apa perbedaan ideologi politik dan pemikiran politik, kita dapat memahami karakteristik khas dari ideologi politik ini.

Suatu pemikiran politik bisa disebut sebagai ideologi politik, jika memenuhi kriteria berikut:

* Komprehensif: Menyeluruh, menyentuh banyak aspek hidup kemasyarakatan.
* Pervasif: Membentuk keyakinan dan tindakan politik dari banyak orang serta dikenal dalam jangka waktu yang lama.
* Ekstensif: Melibatkan banyak pendukung dengan banyak peran politik dan bisa melibatkan banyak negara.
* Intensif: Komitmen untuk mendukung terjadi cukup kuat.

Jadi, ketika suatu pemikiran tidak memiliki keempat kriteria di atas, berarti pemikiran tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai ideologi.

**Macam – Macam Ideologi**

Ideologi politik di dunia ini ada berbagai macam. Menurut C. C. Rodee, ideologi politik utama di dunia ini ada tujuh macam, meliputi: (1) Anarkisme; (2) Liberalisme Klasik; (3) Sosialisme; (4) Komunisme; (5) Neo Liberalisme: (6) Konservatisme; (7) Fasisme. Berikut penjelasannya.

1. **Anarkisme**

Ideologi anarkisme adalah falsafah politik yang memiliki pandangan bahwa masyarakat bisa (dan sudah seharusnya) eksis tanpa harus terdapat aturan-aturan yang mengikatnya. Ideoologi anarkisme ini dianggap sebagai pandangan ekstrim tentang kebebasan individu dan tentang organisasi sosial yang tanpa peringkat atau wewenang.

Asumsi utama dalam ideologi ini adalah bahwa negara merupakan sumber ketidakteraturan di dalam tubuh politik, serta pemerintah pada hakikatnya adalah opresif. Oleh karena itu, sudah seharusnya manusia bebas dari segala bentuk kekuasaan pemerintahan sebelum masyarakat dapat membangun masyarakat baru yang lebih baik berdasarkan keadilan, cinta, dan semangat kerjasama.

Ideologi ini memandang bahwa masyarakat masa depan harus terdiri dari unit-unit kecil, yang tidak seorangpun boleh memaksakan kehendaknya pada orang-orang lain. Jadi, pada intinya, ideologi ini memandang bahwa setiap orang dalam kelompok ini pada dasarnya terlahir bebas dan harus selalu bebas.

1. **Liberalisme Klasik**

Dalam pandangan liberalisme klasik, pemerintahan dalam negara dianggap memiliki fungsi yang harus diminimalisir sebisa mungkin. Bahkan, negara disarankan hanya sebagai *watchdog*. *Watchdog* sendiri adalah istilah dari kaum liberal klasik yang menyarankan negara hanya menjadi sekedar penjaga terhadap masyarakat yang bebas bertindak, untuk memastikan bahwa kebebasan itu tetap ada.

Nilai-nilai doktrin yang diutamakan dalam ideologi ini memang adalah kebebasan individu. Bagi penganutnya, kekuasaan pemerintah dianggap dapat mengurangi kebebasan individu dalam berusaha dan justru membatasi individu untuk mencapai kesejahteraannya.

Negara tidak perlu mengurusi nasib individu karena mereka pada dasarnya akan berusaha mencukupi kebutuhannya sendiri. Berbagai bantuan sosial juga tidak diperlukan karena tindakan individu dalam mengeja kesejahteraan pada dasarnya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa ideologi ini memandang bahwa individu seharusnya bebas berusaha dan mencapai kemakmuran yang diinginkannya sendiri, sekalipun hidup di dalam negara.

1. **Sosialisme**

Sosialisme merupakan ideologi politik yang berangkat dari ajaran utama seperti kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi, serta pandangan bahwa pertukaran pasar seharusnya digantikan oleh bentuk distribusi lain yang didasarkan kebutuhan sosial.

Kebutuhan sosial dalam ideologi ini menjadi hal utama. Dalam sosialisme, dikenal juga adanya Sosialisme Demokrasi, yang menurut Anthony Giddens, memiliki karakteristik berikut:

* Keterlibatan negara dalam kehidupan sosial dan ekonomi cukup luas.
* Negara mendominasi masyarakat madani.
* Adanya prinsip kolektivisme.
* Adanya manajemen permintaan dalam korporatisme.
* Adanya pembatasan peran pasar, ekonomi sosial atau campuran.
* Pemberdayaan sumber daya manusia yang ada secara maksimal.
* Penerapan egalitarianisme yang kuat.
* Negara kesejahteraan yang kuat dalam melindungi warganegaranya, mulai dari lahir sampai mati.

### ****Komunisme****

### Ideologi komunisme berkembang dari pemikiran Karl Marx dan Frederick Engels ketika mereka bersama-sama menuliskan karya tulis Communist Manifesto. Menurut mereka, kemenangan revolusioner atas kapitalisme akan mengantarkan berjayanya sosialisme.

### Dalam ideologi ini, diuraikan mengenai tindakan dan tahapan bagaimana komunisme bisa terbentuk dalam masyarakat. Di tahap awal, setiap orang akan bekerja menurut kemampuannya dengan tujuan untuk kebaikan bersama. Sedangkan penghargaan terhadap setiap pekerja ini kurang lebih akan setara dengan sumbangannya kepada masyarakat.

### Lalu pada fase kedua, akan terbentuklah pemerintahan komunisme, yakni ketika produksi barang-barang akan mencapai puncak sedemikian rupa, yang memungkinkan setiap orang dapat dihargai sesuai dengan kebutuhannya.

### Pada tataran ini, fungsi dan keberadaan negara akan melemah dan semua instrumen kekerasan juga penindasan akan lenyap. Di sinilah, terbentuklah komunisme dengan menjalankan kaidah-kaidah sosialisme.

1. **Neo Liberalisme**

Menurut Anthony Giddens, ada beberapa karakteristik khas dari para penganut ideologi neo liberalisme yang berkembang di Eropa Barat, yang utamanya berfokus pada paham *welfare state*. Adapun karakteristik neo liberal tersebut adalah:

* Peran negara yang sangat minimal dalam kehidupan masyarakat.
* Masyarakat madani yang sifatnya otonom.
* Adanya fundamentalisme pasar.
* Otoritarianisme moral serta individualisme ekonomi yang sangat kuat.
* Adanya kemudahan pasar tenaga kerja.
* Kondisi ketidaksamaan dalam penerimaan atau pendapatan.
* Nasionalisme tradisional yang lemah.
* Negara kesejahteraan yang hanya berfungsi sebagai jaring pengaman.
* Kondisi modernisasi yang linear dan berkembang oleh masyarakat sendiri.
* Adanya kesadaran ekologis yang rendah.
* Teori relasi tentang tatanan internasional yang saling terkait antar individu.

1. **Konservatisme**

Dalam ideologi ini, karakter yang paling khas muncul dari adanya ketakutan terhadap perubahan yang tiba-tiba dan dahsyat dalam masyarakat dan negara. Karenanya, ideologi ini memiliki penghormatan yang mendalam terhadap pranata dan peraturan yang telah mapan dalam masyarakat.

Ideologi ini mengakui bahwa masyarakat yang baik adalah masyarakat yang tertata dengan susunan masyarakat yang memiliki struktur stabil. Tujuannya adalah agar hubungan antara individu sebagai anggota masyarakat bisa lebih terjamin dalam berbagai hal.

Ideologi ini memberikan dukungan secara penuh terhadap elit dan hierarki dalam pemerintahan. Sebab, menurut ideologi ini, apa yang sudah berjalan mapan dalam masyarakat, bersama dengan para elit dan hierarki politik yang terbangun, adalah kondisi terbaik. Jadi, sudah selayaknya dipertahankan.

Bagi para konservatif, untuk menciptakan keteraturan sosial, diperlukan adanya pemerintahan dengan kekuasaan yang mengikat tetapi bertanggung jawab. Bagi penganut ideologi ini, tidak ada kecurigaan terhadap paham kekuasaan, sepanjang bisa bertindak positif untuk mencapai tujuan sosial bersama.

Sebab, pihak yang berkuasa bagi ideologi ini memiliki tanggung jawab terhadap kaum yang lemah. Ini berbeda dari pandangan kaum liberal, yang beranggapan bahwa nasib kaum lemah tergantung pada individu itu sendiri.

Melalui paham konservatisme ini, lahirlah negara kesejahteraan (*welfare-state*) dengan adanya program-program jaminan sosial bagi masyarakat dengan penghasilan rendah.

1. **Fasisme**

Kemunculan ideologi fasisme adalah dampak negatif dari perkembangan industrialisasi, modernisasi, dan demokratisasi. Fasisme juga muncul sebagai reaksi terhadap berbagai kesenjangan yang ada dalam masyarakat, penderitaan berkepanjangan, serta rasa ketakutan akan ketiadaan harapan untuk masa depan yang lebih baik.

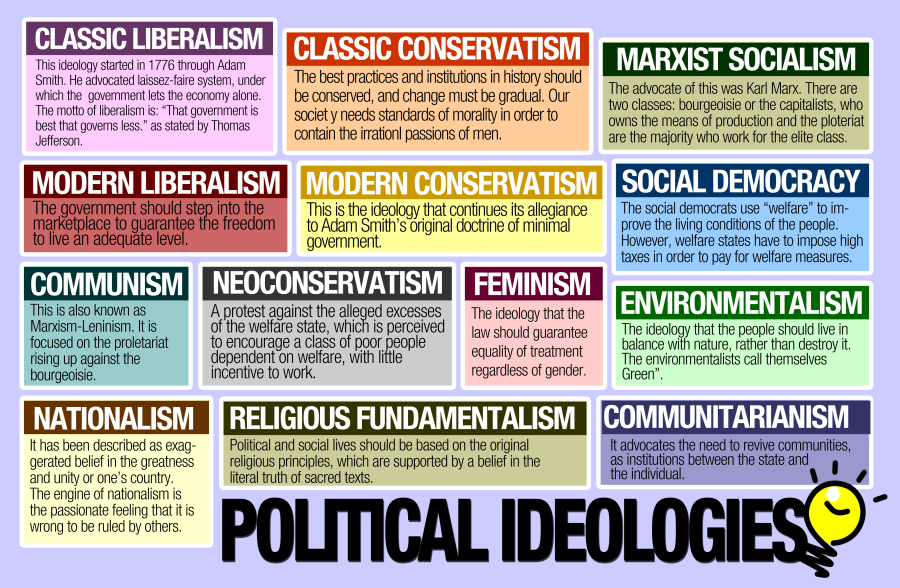
Ideologi fasisme ini merupakan ideologi yang kompleks karena merupakan percampuran dari berbagai gagasan ras, agama, ekonomi, sosial, dan moralitas akar-akar filosofis yang berkembang dalam masyarakat.

Kemunculan fasisme sendiri biasanya ada dalam masyarakat yang telah maju (*developed* *country*) dan makmur serta yang telah mengalami proses industrialisasi dan modernisasi yang pesat, juga relatif telah berhasil mengembangkan teknologi tinggi, hanya saja mengalami kegagalan demokratisasi.

Di dalam Fasisme, terdapat beberapa doktrin, seperti:

* Gagasan Gobineau mengenai superioritas ras, yang beranggapan adanya hierarki ras. Gagasan ini beranggapan bahwa ras yang tertinggi adalah ras kulit putih, kemudian kulit kuning, dan terakhir kulit hitam.
* Adanya pandangan Anti-semitisme. Dalam mitos ras itu, juga melahirkan adanya sikap-sikap kebencian terhadap ras lain, yang utamanya adalah ras Yahudi.
* Totalitarianisme. Fasisme tidak hanya meliputi pandangan terhadap sistem organisasi politik atau pemerintahan saja, melainkan juga keseluruhan kehendak (*will*), pemikiran (*thought*), dan perasaan (*feelings*) dari suatu bangsa.

Semua ideologi ini sangat mempengaruhi opini seseorang terhadap suatu isu bahkan ketika individu tersebut melakukan voting.



**Partisan dan Opini**

Partisan merupakan pengikut partai, paham atau golongan tertentu (source; KBBI) sehingga mereka yang tergabung atau aktif dalam gerakan partai tentu memiliki kesetiaan pada figur atau tujuan dari partai / organisasi sebagai sebuah kesatuan. Merupakan hal yang wajar bahkan wajib pabila seorang partisan mendukung kegiatan partainya dalam mencapai tujuan terutama pada kompetisi pemilihan wakil rakyat, kepala daerah, Presiden dan berbagai posisi pada semua jenjang. Seorang partisan akan menunjukkan kesetiaan seorang kader dalam mengerahkan segala kemampuan untuk menunjukkan dharma bhakti dirinya kepada kelompoknya.

Partisan memiliki figur pemimpin yang dijadikan acuan, panutan dan pemberi komando kemana perjuangan akan diarahkan, yang tentu partisan berdasar pada idiologi partainya, prinsip serta strategi berdasarkan karakteristik partai.

Perilaku voting seorang individu terkadang tidak terpengaruh oleh ideologinya, akan tetapi berpegang kepada kesetiaannya pada suatu partai. Menurut Belknap and Campbell yang dikutip oleh Sobel, penduduk terkadang tidak tertarik dan tidak familiar terhadap isu-isu politik, akan tetapi mereka mengidentifikasi dirinya dengan sebuah partai politi. Individu yang memiliki pandangan demikian disebut partisan. Kenapa seorang individu membangun kedekatan dan terikat dengan sebuah partai politik? Miller dan Shank (1996) membaginya ke dalam 3 pandangan:

* Identitas

Seorang partisan akan terikat pada sebuah partai politik apabila ia merasa memiliki identitas yang sama sejak mereka lahir. Identitas yang dimaksud dapat berupa agama, ras, gender, suku, atau bahkan karakteristik psikologisnya.

* Pilihan Rasional.

Beberapa orang menjadi pengikut setia partai sejak mereka dilahirkan karena tradisi keluarga. Akan tetapi, banyak individu yang menjadi partisan karena pilihan rasional mereka. Artinya, mereka memilih mendukung suatu partai karena partai tersebut mampu memberikan keuntungan terbanyak dalam kehidupan mereka contohnya dalam isu mengenai pendidikan, pajak, dan kebijakan imigrasi. Partisan yang memiliki latar belakang seperti ini, cenderung temporer dan berubah seiring dengan perkembangan isu.

**Partisan Media Massa**

Pertumbuhan partai politik dan media massa muncul bersamaan sebagai produk reformasi, dan keduanya menjadi pilar terpenting dalam demokratisasi di Indonesia. Media massa yang demikian bebas diharapkan mampu memberikan akses informasi yang beragam bagi kebutuhan masyarakat. Setiap saat curahan informasi sedemikian masif, mencoba mengambil alih ruang publik dan membentuk kesadaran massa. Tak terkecuali informasi politik terkait kontestasi antar parpol maupun kandidat capres/cawapres yang diusungnya.

Adalah wajar jika setiap kandidat capres/cawapres berkepentingan untuk berkomunikasi dengan massa dalam kerangka sosialisasi gagasan maupun membentuk citra guna menarik dukungan massa. Media massa karena itu menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan intensitas interaksi secara langsung antara para capres/cawapres dengan konstituennya yang demikian tersebar dan dalam jumlah yang besar.

Hubungan kepentingan di antara dua kekuatan ini dalam perkembangannya tidak hanya melahirkan kontrak-kontrak komersial yang bersifat profesional, seperti periklanan dalam bisnis biasa. Seringkali, hubungan ini menjadi memiliki dimensi politis dimana antara capres/cawapres dengan parpol pengusungnya kemudian memiliki hubungan afiliatif dengan media massa, baik karena tendensi politik dari media massa itu sendiri maupun konflik status dimana pemilik media massa juga merangkap kontestan dalam pilpres. Lihat saja setidaknya dalam pemberitaan MNC Group terhadap pasangan WIN/HT dan Hanura, Metro TV dengan Nasdem maupun Viva Group dengan Abu Rizal Bakrie dan Golkar semasa Pileg yang lalu. Meski perlu dibuktikan lebih jauh, namun setidaknya potensi tendensius itu lebih besar bagi kelompok media tersebut.

Hubungan afiliatif media massa dengan capres/cawapres maupun parpol pengusungnya berdampak pada objektifitas informasi, bahkan potensi politisasi pemberitaan media. Perburuan rating dan keuntungan tidak lagi menjadi satu-satunya motivasi, tetapi sangat dimungkinkan insentif politik lain dari pembelaan media massa terhadap kelompok politik tertentu. Hipotesis Mutz & Reeves (2005) tentang media massa dan kepentingan politik setidaknya menjelaskan bahwa penggambaran politik di media massa memiliki kecenderungan untuk menyederhanakan, kecenderungan untuk menyalahkan pihak tertentu, menempatkan politik selalu negatif, maupun sebaliknya.

Potensi sikap partisan media massa dalam politik itulah mendorong munculnya moratorium pemberitaan dan iklan politik pada pertengahan Maret hingga awal April menjelang Pileg yang baru saja usai. Langkah tersebut meski sempat dipersoalkan oleh sejumlah kandidat capres/cawapres maupun parpol, namun telah mengkonfirmasi sinyalemen sikap partisan media sekaligus agar masyarakat kritis terhadap informasi politik. Media massa menjadi agen pembentuk citra politik, larut dalam skenario pertarungan opini yang acapkali tendensius dan berpotensi menyemai keresahan massa. Pertarungan ide dan konsep pembangunan yang seharusnya menjadi arus utama pemberitaan para capres dan cawapres justru tidak muncul.

**Pemilihan Identitas atas Dasar Alasan Tertentu (Identity Based on Reasoning).**

Pandangan ini mengkombinasikan dua pandangan sebelumnya. Dimana seorang individu dianggap menjadi partisan karena proses yang panjang. Seorang individu membentuk keyakinan politik mereka sejak kecil lalu mengembangkannya seiring dengan waktu dan informasi-informasi baru. Partisan yang muncul dari pandangan ini sangat peduli tentang suatu isu, tetapi tidak mengesampingkan identitas dan image yang terdapat pada sebuah partai.

# Daftar Pustaka

* Budiardjo, Miriam. 1996. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
* Djoenaesih S. Sunaryo, *Opini Publik*, Liberti, Yoyakarta, 1984
* Efriza. (2014). *Parliamentary Studies: History, Concepts and the Political Landscape of Indonesia*. Malang: Equivalent Press
* Helena Olii, *Opini Publik*. Indeks, Jakarta 2007
* Hayward, K. (2015). *Defining Democracy: Voting Procedures in Decision-making, Elections and Governance. Representation*, 51 (2), 269–271.
* Higashikata, T., & Kawamura, K. (2015). *Voting Behavior in Indonesia* from 1999 to 2014, (512).